



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAKER KOMISI VI DPR RI DENGAN MENKOP UKM RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 37 (tiga puluh tujuh)
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Waktu : 14.26 s.d 15.46 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P.Nasdem)
Acara : 1. Penyesuaian RKA/KL Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran.
2. Progres Pelaksanaan BPUM Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pelaksanaan BPUM Tahun Anggaran 2023.
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
41 dari 55 orang Anggota, dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
11 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulisto
 3. Darmadi Durianto
 4. Reike Diah Pitaloka
 5. ST. Ananta Wahana, S.H.
 6. Sonny T. Danaparamita
 7. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 8. Dr. Evita Nursanty., M.Sc
 9. Sondang Tiar Debora Tampubolon

10. DR. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

11. H. Heru Sudjatmoko

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

7 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji., S.E., M.Si.

2. Ir. H. Mohamad Idris Laena

3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.

4. Doni Akbar, S.E.

5. Trifena M. Tinal, B.Sc,

6. Nusron Wahid

7. Budhy Setiawan

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

5 dari 6 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A,

2. Andre Rosiade

3. Ir. H. La Tinro La Tunrung

4. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.

5. Hendrik Lewerissa., S.H., LL.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

6 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.

2. Drs. H. Nyat Kadir

3. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

4. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.

5. Muhammad Rapsel Ali

6. H. Subardi., S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 dari 5 orang Anggota

1. Ir. H.M. Nasim Khan

2. Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

5 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. Herman Khaeron, M.Si.

2. Muslim, SHI., M.M.

3. Hj. Melani Leimena Suharli

4. Putu Supadma Rudana

5. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom.,
M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.

2. Hj. Nevi Zuairina

3. Rafli

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

1 dari 5 orang Anggota

1. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

1 dari 1 orang Anggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN/PEMERINTAH

1. Teten Masduki (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI)
2. Arif R. Hakim (Sesmenkop)
3. A. Zabadi (Deputi I Kemenkop)
4. Supomo (Dirut LPDB)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati, Menteri Koperasi dan UKM RI, Saudara Teten Masduki, beserta jajaran,

Kita ucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, khususnya pada hari ini Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI.

Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 22 orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI, secara fisik dan virtual, yang terdiri atas 8 fraksi dengan 4 orang anggota izin. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju?

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.26 WIB)**



Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Koperasi dan UKM RI beserta jajaran, atas kesediaan waktunya untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari ini. Kami juga ingin mendapatkan persetujuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, karena ini merupakan rapat ketiga kita membahas RKA K/L dengan Kementerian Koperasi. Rapat yang pertama itu pada tanggal Selasa, 6 September 2022, eh rapat yang kedua maksud saya. Rapat yang pertama pada tanggal 1 September 2022. Dan kalau saya lihat dari pagu anggaran dari dua rapat sebelumnya, masih sama, sekitar 1,407,5 triliun. Jadi saya rasa kita tidak perlu terlalu lama rapat pada hari ini, kita cukup membahas apa yang masih diperlukan terkait dengan kinerja dari Kementerian Koperasi dan UKM ini. Maka saya usulkan kita bisa mengakhiri rapat pukul 3.30.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian,

Berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor B16721/AG.05.02/09/2022 perihal Penyampaian hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun 2023, disampaikan bahwa sesuai hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023, disampaikan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga sebagai bahan penyempurnaan RKA K/L di Komisi dan mitra kerjanya. Dengan rincian alokasi anggaran belanja K/L TA 2023 sebagai berikut, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.407.500.000.000, ini suratnya masih pembulatan seperti ini ya? Dari Banggar ya, Pak, ya? Oke, itu pembulatannya. Namun berdasarkan hasil rapat kita yang lalu, untuk angka eksaknya itu Rp1.407.517.242.000,00. Karena itu kita meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 6 September 2022.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga pada kesempatan rapat kali ini ingin mendapatkan penjelasan mengenai progres pelaksanaan Banpres produktif usaha mikro tahun anggaran 2022 dan rencana pelaksanaan Banpres produktif usaha mikro tahun anggaran 2023.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya kepada kami.

Kami persilakan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):



Makasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati, dan
Hadirin yang berbahagia,

Singkat saja, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 sebesar Rp1.407.517.242.000,00 yang ini nanti akan dialokasikan untuk dua hal, satu untuk program dukungan manajemen dan kedua alokasi untuk program kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Yang nanti ini yang program kewirausahaan, UKM, dan koperasi, ini akan digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan, belanja operasional pegawai, belanja operasional barang, dan juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional, di antaranya untuk pendataan. Jadi ini tidak ada perubahan, Pak Ketua.

Berikutnya yang ingin saya sampaikan mengenai kegiatan sosialisasi sinergi kementerian, alokasi anggarannya kegiatan Kementerian Koperasi mengalami kenaikan sebesar 102,31% dari yang semula di tahun lalu hanya Rp29.657.000.000,00, ya sekarang menjadi 60 miliar. Saya kira ini cukup signifikan kenaikannya. Nah rincian kegiatan sinergi Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini meliputi sosialisasi kegiatan strategis bagi usaha mikro dan masyarakat inkubasi kewirausahaan ya, barangkali itu.

Nah mungkin ingin kami sampaikan mengenai tadi yang diminta oleh Pak Ketua, yaitu BPUM (Banpres Produksi Usaha Mikro). Kami sudah, sebagaimana sudah disampaikan, bahwa kami sudah mengajukan kepada Kementerian Keuangan dan Menko Ekonomi, dan waktu itu sudah ada sedikit *agreement* dan kami susulkan lagi pada 15 September lalu kepada Kementerian Keuangan, kami sedikit melakukan *adjustment*, karena kami tahu bahwa anggarannya memang belum tersedia. Kami ajukan lagi sebesar 1,2 triliun ya, yang akan diusulkan, disalurkan untuk 2 juta pelaku usaha mikro dengan besaran bantuan untuk setiap pelaku usaha mikro adalah sebesar 600 ribu.

Ini kita *adjust* lagi bukan karena soal *budget*-nya, juga tapi karena waktunya juga *udah* sangat pendek, hampir tidak mungkin, tapi *Insy Allah* saya kira usulan dari teman-teman *udah* kita akomodasi. Berbagai upaya regulasi untuk pelaksanaan ini sudah kami selesaikan, jadi ini Permenkopnya juga sudah memudahkan untuk menyalurkan ini, jadi ini kami sudah siap, tinggal memang ini persetujuan dari Komite PEN ya, Kementerian Keuangan. Barangkali itu, Pak Ketua.



Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi, santi, santi om.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kepada Pak Menteri.

Saya persilakan, ini yang sudah mendaftar Bapak/Ibu Anggota, dari sebelah kanan, Pak Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Terima kasih, Pimpinan, Pak Martin Manurung.

Seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Jadi saya tidak akan membahas RKA K/L lagi, karena memang sudah sesuai dan sudah dibahas. Saya hanya fokus soal BPUM, Pak Menteri, soal Banpres produktif usaha mikro. Kita tahu pemerintah menaikkan BBM dan ini tentu berdampak kepada inflasi, berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat. Untuk itu dari awal kami di Fraksi Partai Gerindra sudah ingin dan selalu meminta pemerintah untuk menunda kenaikan BBM, tapi keputusan sudah diambil. Untuk itu kami sudah memperjuangkan dari awal, kebijakan Fraksi Partai Gerindra itu ingin menaikkan bantuan pemerintah itu bukan 24 triliun, Pak Menteri, tapi 78 triliun. Dan bukan hanya tiga bulan, tapi enam bulan, sehingga, dan jangkauannya juga diperluas. Nah salah satunya ini soal BPUM, Pak Menteri, soal Banpres Produktif Usaha Mikro. Dan saya dan kami semua rasanya seluruh Anggota Komisi VI, sudah mengusulkan ini secara resmi dalam rapat kerja sebelumnya dengan Pak Menteri. Tapi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa belum ada lampu hijau dari Menteri Keuangan, meskipun surat resmi dari Menteri Koperasi dan UMKM tanggal 15 September itu sudah meminta 1,2 juta triliun. Nah Pimpinan, sebenarnya angka 1,2T itu kan tidak besar, tapi akan berdampak besar kepada rakyat kalau program BPUM ini turun. Untuk itu ya, saya minta kepada Pimpinan secara resmi, untuk *bikin* kesimpulan rapat yang mengikat dengan kita, agar Menteri Koperasi dan UKM wajib memperjuangkan BPUM, supaya ini mengikat pemerintah *gitu loh ya, enggak* ada alasan Menteri Keuangan untuk tidak memberikan dukungan ini. Ini kan soal keberpihakan Menkeu ya, karena angka 1,2T secara di APBN tidak besar, Pak Menteri, tapi ini besar manfaatnya bagi rakyat.

Jadi sekali lagi, kita mengapresiasi dan mendukung langkah Pak Menteri Koperasi dan UMKM, dan untuk itu kita berikan dukungan politik penuh kepada Pak Menkop untuk menyampaikan ini kepada Menteri Keuangan, dan menyampaikan ini kepada Presiden, Pak Menteri. Saya rasa



Pak Jokowi juga paham bahwa banyak pelaku UMKM kita yang harus kita bantu, karena terdampak oleh kenaikan BBM. Ya kalau misalnya Bu Menteri *enggak* mau, Pak Teten jangan ragu, kita *bikin* kesimpulan rapat, Bapak lapor presiden, dan minta presiden panggil Menteri Keuangan untuk berikan anggaran 1,2 triliun ini, Pak, ya.

Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Baik, kita ke sebelah kiri, Ibu Evita Nursanty.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Baik, terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya rasa saya juga berpendapat yang sama, Pak, ya, di tengah-tengah dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, kenaikan BBM dan lain-lain, tentunya memang masyarakat sangat membutuhkan ya, terutama UMKM kita, untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Dan ini merupakan hal yang sangat saya sangat penting dan saya sepakat bahwa itu nantinya diharapkan bisa masuk pada kesimpulan rapat kita.

Selain itu, Pak, saya hanya ingin mempertanyakan saja, Pak, saya mendukung, waktu itu kan Pak Teten punya program yang namanya, apa namanya, Data Tunggal Koperasi dan UMKM. Yang tentunya kita berharap data ini merupakan data yang akurat, Pak Teten, mutakhir, dan sangat terpadu, Pak Teten. Waktu itu Bapak mengatakan targetnya ada 14,5 juta data di 2022 dan 2024 sampai 65 juta. Saya ingin tahu saja, Pak, seperti apa saat ini apa namanya progresnya dan koordinasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi ini kepada ke lembaga lain, kementerian lain, dan institusi lain, misalnya kepada BPS, Pak, kan juga Kementerian Industri juga punya data IKM. Nah sinkronisasi daripada data ini seperti apa, Pak? Saya juga ingin tahu, karena terus-terang saja dana yang dianggarkan untuk data tunggal ini tidak sedikit, 387 M ya, Pak, ya? Tentunya kita berharap data ini benar-benar menjadi data yang memang menjadi data tunggal daripada apa namanya, informasi mengenai UMKM kita yang ada apa namanya, di Indonesia.

Saya rasa saya hanya mempertanyakan itu saja, Pak, progresnya seperti apa, dan mohon, Pak, diperjuangkan mengenai apa namanya, BPUM yang tadi sudah disampaikan oleh teman yang sebelumnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:



Baik, kita ke kanan lagi, Pak Harris Turino.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM beserta seluruh jajarannya,

Kita tahu pemerintah sudah mengalokasikan 27 triliun ya, untuk bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak akibat dari kenaikan BBM. Dan juga bantuan bagi pekerja yang memiliki gaji kurang dari 3,5 juta. Nah sejarah Republik Indonesia membuktikan, dari satu krisis ke krisis yang lain, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah usaha kecil dan menengah. Maka dari itu, saya sangat mendukung bahwa untuk tahun anggaran 2022 BPUM bisa dilaksanakan. Apalagi kalau kita lihat bahwa di pagu anggaran 2022 itu alokasi anggarannya sudah ada, cuma memang belum bisa cair. Maka dari itu saya mohon kepada Komisi VI untuk memasukkan ini ke dalam kesimpulan rapat, bahwa Komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk memperjuangkan alokasi dana BPUM bisa dicairkan sebesar 1,2 triliun, karena pengusaha mikro di daerah, ini sangat membutuhkan. Angkanya memang 600 ribu, tidak besar, Pak, kelihatannya, tapi bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro ini adalah sangat dirasakan manfaatnya.

Itu saja, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Baik, *makasih*, Pak Harris.
Kita ke kiri, Pak Muslim.

F-P.DEMOKRAT (MUSLIM, S.HI., M.M):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri, Pak Teten, beserta jajarannya,

Saya menambahkan *aja*, Pimpinan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre, saya lihat, Pak Harris maupun Bu Evita. Kalau kita lihat dari usulan alokasi anggaran program BPUM 2022 ini sebesar 1,2 triliun dengan



penerima sekitar 2 juta untuk pelaku usaha mikro, memang sampai hari ini kita lihat hal-hal pembahasan anggaran sudah selesai Pak Teten ya? Satu sisi, dengan kenaikan BBM segala macam ini, saya yakin harusnya ini menjadi prioritas kepada pelaku-pelaku usaha mikro yang jumlahnya itu 2 juta. Saya yakin ini, saya sepakat, Pimpinan, ini kita jadikan satu kesimpulan kepada khususnya kepada pemerintah, Kementerian Keuangan, supaya anggaran 1,2 triliun ini kita harapkan bisa direalisasikan, *kenapa?* Karena ini momennya juga sangat dibutuhkan oleh pelaku-pelaku usaha mikro, Pak Menteri, ya. Saya pikir, Pak Pimpinan, Pak Ketua, saya sepakat tadi supaya ini menjadi kesimpulan kita bersamalah, supaya kita dukung kepada Pak Menteri ini, untuk segera menyurati lagi kepada Kementerian Keuangan sekaligus Pak Presiden, supaya ini bisa dicairkan di tahun 2022 untuk 2 juta pelaku usaha mikro.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Ke kanan, Pak Deddy Yevri Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, terima kasih.

Sebenarnya kalau soal anggaran, kami tadinya berharap bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan sektor-sektor ekonomi produktif, Pak Menteri, untuk mendapatkan dukungan terkait dengan kenaikan BBM, apalagi kan pandemi juga belum 100% pulih ekonomi kita, sehingga perlulah ada suatu apa namanya, keberpihakan dan alokasi anggaran yang jelas untuk kegiatan ekonomi produktif, Pak. Mungkin dalam bentuk bantuan BPUM itu kalau sudah, sudah ini, karena itulah yang bisa memitigasi daya beli rakyat itu ya. Saya lebih setuju itu yang ditingkatkan daripada sekedar Bansos. Supaya mempunyai efek apa namanya, penciptaan ekonomi, daripada sekedar dikonsumsi, *gitu*. Memang untuk rakyat-rakyat yang sangat miskin sesuai dengan ketentuan konsitusi kita, memang negara harus apa namanya, memelihara dan tidak bisa mengabaikan, Tetapi mendorong ekonomi produktif di tingkat bawah itu juga jauh lebih penting untuk memastikan rakyat punya daya tahan menghadapi inflasi yang akan naik, lalu kemudian peningkatan harga bahan, apa, bahan-bahan pokok sebagai akibat dari BBM, itu yang pertama.

Yang kedua, kami juga berharap agar pesan ini disampaikan, Pak, kepada Kementerian Keuangan dan kepada presiden, ya supaya untuk menunjukkan bahwa mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah itu memang



inklusif *gitu*, tidak hanya sekedar bantalan sosial, tetapi juga mendorong ekonomi produktif tadi *gitu* ya, sehingga apa namanya, kebijakan untuk merealokasi subsidi, ya, memperbesar ruang fiskal negara itu, memang benar-benar bermanfaat, *gitu*.

Lalu yang ketiga, Pak, saya pernah menghubungi Pak Menteri ini terkait dengan apa namanya, minyak goreng merah. Mungkin ini *out of topic* ya, tapi kami ingin mendengar mungkin penjelasan ini, kesempatan untuk juga untuk menyampaikan kepada kami dan kepada masyarakat, rakyat Indonesia, tentang apa *sih*, karena komunikasinya kurang baik, sudah banyak terjadi fitnah-fitnah, *gitu*, atau katakanlah disinformasi. Ya ada yang mengatakan bahwa minyak goreng merah itu nanti hasilnya di bawah minyak jelantah *gitu* kan kira-kira, ini kan harus diklarifikasi sebelum menjadi isu publik yang menimbulkan polemik yang *enggak* perlu, karena bangsa ini suka *banget* polemik, Pak. Jadi mohon dari awal pra kondisi dan komunikasi itu memang benar-benar dilakukan dengan baik.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Daftar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang mana, *entar* satu-satu dulu, Pak, ke kiri, Pak Hendrik, Ibu Nevi, satu lagi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Daftar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu, oh Pak Darmadi, oke kita tadi kan kanan, kita ke kiri dulu, Pak Hendrik.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,
Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,



Selamat sore,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya kira sama seperti teman-teman sebelumnya, saya tidak akan menanyakan soal anggaran, karena itu sudah dibahas beberapa kali dan tidak ada perubahan juga terkait hal itu. Tapi bagi saya, ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan langsung manfaatnya kepada UMKM. Saya mencatat itu ada tiga, Pak, tiga norma undang-undang yang sangat bermanfaat bagi UMKM, yaitu yang pertama adalah kewajiban pengadaan barang dan jasa di kantor-kantor kementerian, badan, dan lembaga, pemerintah daerah, itu wajib untuk meng apa, wajib berasal dari, 40% wajib berasal dari UMKM, itu satu. Ini kan kebijakan yang sangat afirmatif sekali untuk UMKM.

Yang kedua adalah kewajiban fasilitas umum untuk menyediakan 30% area untuk pengembangan UMKM, dan yang ketiga adalah ada alokasi dana dari yang berasal dari dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah yang wajib ditujukan untuk pemberdayaan UMKM, Pak. Ini perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat, tapi ini masih berlaku, Pak. Normanya masih menjadi hukum positif saat ini. Nah dengan keterbatasan anggaran yang Bapak miliki, saya kira ini kan penting sekali, kalau kita memang betul-betul ingin untuk memberdayakan UMKM yang sangat berjasa bagi perekonomian kita. Nah pertanyaan saya adalah apa mekanisme dari Kementerian Koperasi UMKM, untuk memastikan bahwa ketiga perintah undang-undang ini terimplementasi dan manfaatnya dirasakan oleh UMKM di Indonesia?

Saya kira, saya kira itu, Pak, itu satu-satunya pertanyaan saya.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, *makasih*, Pak Hendrik.

Kita ke kanan, Pak Rudi Hartono.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Makasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan, Ketua, dan seluruh anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Teten, Pak Sesmen, Dirjen, dan seluruh jajaran,



Pak Teten,

Di sini saya baca buku paparan dari Bapak, berkas rencana kerja dan anggaran. Jadi ini kan dipaparkan pagu yang diturunkan Badan Anggaran 1,475 triliun; Pak, jadi ini kan pembahasan yang sudah kita lakukan hingga ketiga kalinya atau keempat kalinya, Pak. Jadi ini sepertinya sudah menuju definitif ya, Pak? Jadi saya pikir ini sudah okelah, Pak. Jadi saya hanya ingin mau memberikan juga pendapat saya, Pak, Pak Teten, DPR kan memberikan pendapat, menyatakan pendapat, dan saran. Pendapat saya kepada Pak Teten adalah tentang bantuan BPUM, Pak, yang sudah selama ini dianggarkan di tahun 2022, yang tadi disebut juga teman-teman dan rapat-rapat yang lalu adalah sebesar kurang lebih 2 triliun ya, Pak, ya? Dan tadi Bapak bilang, ada diusulkan lagi kok jadi 1,3, 1,2 triliun diturunkan ya, Pak?

BPUM ini kan begini, Pak, ini, ini saya ingin ceritakan juga kondisinya Pak. BPUM ini bantuan yang juga sangat ditunggu-tunggu, Pak, sebenarnya, oleh para pelaku usaha ultra mikro, yang pedagang keliling yang sangat kecil, Pak, misalnya pedagang pecel, tape, cendol, sayur, yang uang 200, 300 ribu sangat mereka nanti, Pak. *Kenapa* saya bisa sampaikan itu? Saya ketika kemarin rapat yang kedua atau ketiga ada kita sepakati dengan Pak Sekretaris juga, tentang BPUM ini yang akan kita turunkan. Saya menyampaikan ke bawah, Pak, ke masyarakat pendukung ataupun simpatisan ataupun masyarakat awam di bawah. Respon mereka sangat-sangat seperti mau apa, Pak, apa, kemarau di musim hujan *gitu*, "Kapan, Pak", *gitu* mereka nanya, "Tolonglah Pak Rudi di, di, di yang benar jangan janji, jangan angin surga," begitu-begitu, Pak. Jadi saya pikir, waduh uang 300, 600 ribu itu bagi ultra mikro ini sangat-sangat Pak, sangat berarti seperti orang kehausan. Jadi saya *ngingatkan* Pak Teten ini agar kiranya, Pak, tadi seperti, Pak, Bapak sampaikan dan kawan-kawan tadi. Ini agak serius, Pak, memohonkan ataupun merapatkan dengan Pak Presiden, karena ini kan bantuan apa, Pak, kepanjangannya, Pak, ada presidennya ini saya lihat, "Bantuan Presiden Usaha Produktif", Pak, ya, jadi ini kan harus ada apa keputusan prerogratifnya Pak Jokowi juga kan, Pak? Dan Bapak sebagai orang dekatnya saya pikir bisalah berargumen ini, Pak, dan ini nyata bukan Bapak juga *ngangkat-ngangkat* Pak Presiden. Ini contohnya pendapat saya dan saran saya yang saya sampaikan ini dari masyarakat pedagang kecil, pecel, tape, cendol, sayur, pedagang keliling, yang ketika kami sampaikan langsung *nyamber*, Pak, dan mereka minta, "Serius, Pak Rudi, jangan bohong-bohongan, kami di sini orang bawah ini susah", *gitu* bahasanya, nah itu sangat ditunggu, Pak Teten.

Kemudian yang kedua Pak Teten tentang syarat, begitu seriusnya saya sampaikan, begitu mereka seriusnya juga menyambut "Apa syaratnya, Pak Rudi, yang harus kami lengkapi", katanya saya sekilas kemarin dengarkan, NIK dan NIB. Jadi karena mereka patuh, Pak, mereka itu orang di bawah itu yang patuh, dilengkapi, Pak, *fotocopy* KTP, segala macam dan NIB-nya. Tapi memang, Pak, NIB ini kesulitan, ini setiap saat mereka *ngupdate ngelapor* ke saya melalui WA, mereka bilang begini "Pak, kami dibantu Dinas Koperasi di



kabupaten/kota dari yang kelompok kita *ngumpul*kan KTP 10 ribu orang ini, baru bisa di NIB-nya masuk ke internet baru 400 orang, kami dikasih di situ dua menit, bentar *udah ketutup*, apa programnya, begitu mau masuk, asal lama dua menit, sudah harus dimulai awal". Jadi memang kesulitan mereka, Pak, dengan nomor induk berusaha ini, *gitu*, karena memang sistem.

Jadi kami mohon ke Teten, Pak Sekretaris, dan dirjen ataupun direktur ataupun kabag-kabag yang menangani ini, syarat ini tolong juga, kan kami juga *enggak* mau asal-asalan, Pak. Kami juga menyeleksi benar-benar orang konstituen yang betul-betul ultra mikro, Pak. Jadi tolong diperkecilah, permudah, Pak, jangan dipersusah begitu, kalau bisa NIK saja, kami mohon NIK itu, Pak. Atau ditambahkan nanti si unsur dari pemerintah desa yang memberi keterangan, contohnya surat keterangan desa bahwasannya benar ini warganya memang orang susah dan ultra mikro pedagangnya, *gitu*, jadi tidak kesulitan. Mereka ini buta juga, Pak, bermain internet ataupun apa menaikkan statusnya ke usaha kecil, *gitu*. Itu Pak Teten yang mereka sampaikan, *gitu*. Saya berharap Pak Teten dan jajaran, Pak.

Kemudian yang terakhir, yang kedua, Pak, saya mengingatkan juga tentang alokasi anggaran yang juga untuk kebutuhan menyapa, untuk bersosialisasi, untuk berdialog dengan rakyat, di 2023 di masa pemilu, masa kampanye, Pak. Artinya begini, ini kan undang-undang memerintah kami, Pak, memerintah kalau Pak Teten mau *nyalon* DPR atau *nyalon* presiden, kami sudah diperintah ini adalah tahun pemilu, tahun pesta rakyat, Pak. Jadi ya Bapak kan mengelola uangnya rakyat, Pak. Alokasi yang kami bahas dengan Pak Sekretaris tolong jangan di, ya, jangan malah dikurangi, dicecili, jangan, Pak, kan *gitu*, Pak, kan? Nah itu, itu yang utama, Pak, karena ini masalah rakyat, Pak. Makanya Ketua Umum kami, Pak, disuruh mendaftar ke KPU, itu tandanya lonceng, Pak, "Ini *loh* ini *udah* pesta kita, rakyat". Jadi tolong masalah anggaran ini harus konsen, Pak. Ingatkan Pak Sekretaris, Pak, mana tahu, "Habis, Pak," katanya Pak Teten. Gawat kami, Pak, ya kan. Memang bisa kantong kami, Pak, cuma lama-lama jebol, Pak. Itu, Pak Teten, saya *ngingat*kan aja, saya kembalikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Baik, kita ke sebelah kiri, Bu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Izin, Pimpinan dan

Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri bersama jajaran,



Pak Menteri,

BPUM itu adalah BLT untuk UMKM Pak Menteri. Jadi UMKM ini tidak mendapatkan bantuan dari mana-mana, tapi dengan adanya BPUM dia mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Kami dari Fraksi PKS mendorong pemerintah agar melanjutkan program BPUM ini, karena ini adalah BLT untuk UMKM, mengingat kondisi UMKM belum benar-benar pulih apalagi kemarin naik BBM, Pak, karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, berdasarkan laporan evaluasi BPUM 2020, ada 44 koma yang kapasitas dari kinerjanya meningkat, Pak. Jadi BPUM ini walaupun dapatnya 600 ribu, betul kata teman-teman, berarti dapatnya 6 berapa, 6 juta mungkin ya, jadi mereka memang sangat-sangat mengharapkan BPUM ini, karena mereka sekarang sedang terpuruk dan terus mereka sangat mengharapkan bantuan pemerintah ini. Dan kinerjanya meningkat, Pak, dengan adanya BPUM ini, yaitu 51,5% usaha UMKM kembali beroperasi karena mendapatkan BPUM. Mungkin Pak Menteri perlu ketahui, semua organisasi yang berkaitan dengan keekonomian dengan pelaku UMKM, itu 80%, 5%-nya pelaku UMKM Pak, ya, sisanya baru usaha besar. Ya sehingga memang harapan kami, Pak Menteri memperjuangkan BPUM yang sekarang ini.

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik, Bu Nevi.

Ke kanan, Pak Darmadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Makasih, Pimpinan.

Pak Menteri, Pak Teten dan jajarannya,

Yang pertama saya tertarik soal minyak goreng merah, Pak Teten. Ini penting sekali, ini kan saat ini program itu siap diedarkan Januari 2023, nah sebetulnya kami Komisi VI ini butuh sebetulnya *feasibility study*, Pak, ini *visible enggak* proyek minyak goreng merah ini, karena kan belum pernah dipaparkan di dalam Komisi VI ini. Takutnya ini *enggak feasible*, Pak Menteri. *Feasibility study* ini kan banyak muatannya, banyak analisisnya. Ini di Kementerian Koperasi dan UMKM sudah ada atau belum, kan kita belum tahu juga. Karena dana yang dipakai itu kan dana dari LPDB, Pak, ya, kalau saya tangkap di media, 1 per 10 ton, 10 ton per hari itu, pabriknya butuh 23 miliar, saya baca beritanya begitu, Pak Menteri. Kalau salah, nanti dikoreksi. Bapak menugaskan 10 koperasi. Dananya dari mana? Saya dapat dari media, dari LPDB dana bergulir. Berarti ini ada bunganya ya, Pak Menteri, ya? Berarti kan ada masuk ada proses bisnis di dalamnya. Nah ini *feasibility study* ini menjadi

sangat penting, Pak Teten, ya. Sekarang kan, kemarin langka *nih* minyak goreng merah di-*launching*, sekarang *udah* banjir, Pak Menteri, apa, kondisinya berubah atau tidak kan. Apa masyarakat bisa terima, *consumer behavior*-nya bagaimana? Ini kan konsepnya merah, padahal selama ini minyak goreng ya warnanya kuning, ya kan. Ini kan *habit*, merubah seperti *kayak gini*, walaupun dikatakan fungsinya, kualitasnya bagus, mengandung vitamin A lebih banyak dan sebagainya. Tetapi ini kan mengubah *habit* ini kan, budaya ini kan *enggak* gampang juga. Jadi kami sebenarnya butuh *feasibility study* dan juga peta jalan dalam tiga tahun ke depan ini seperti apa nanti, setelah 10 koperasi *next*, bagaimana? Jadi ini menjadi sangat penting, jangan sampai 10 koperasi ini nanti dikasih pinjaman LPDB, bangkrut, Pak Menteri. Nanti yang *nanggung* siapa ini, ya kan, program-program seperti *kayak gini*. Koperasi yang ditunjuk bagaimana *monitoring*-nya, apakah sudah, sudah sanggup dia bekerja dengan baik, dengan manajemen yang baik. Nah ini adalah, programnya bagus, kita dukung, Pak Menteri, tapi kita harus lebih hati-hati juga nanti ke depan. Jangan sampai nanti periode berikutnya, kita masih di Komisi VI, kita dengar ocehan kegagalan koperasi dalam minyak goreng merah ini.

Yang kedua adalah program 30 juta UMKM masuk ekosistem digital, Pak, Pak Menteri. Itu kan ada program 30 juta, Pak, memasukkan UMKM ke dalam ekosistem itu kan mudah, Pak Menteri, *enggak* terlalu sulitlah. Tapi bagaimana dengan *value creator*, *value creator*. Bagaimana menciptakan UMKM itu bisa menciptakan nilai, menambah nilai. Nah yang kami belum tahu konsepnya Pak Menteri, soal penciptaan nilai ini, karena UMKM kalau masuk, ya sekarang masuk aja *enggak* ada guna juga kalau *enggak* ada nilai yang dibawa, gagal juga akhirnya, Pak Menteri. Nah strategi untuk menciptakan nilainya itu yang kita juga minta. Bukan sekedar masuk ke LKPP, e-katalog, terus di sana masuk, *enggak* ada nilai yang ditawarkan, kan juga *enggak* bisa, Pak Menteri. Nah ini penting juga bagi kita untuk tahu sebetulnya seperti apa nanti harapannya.

Jadi itu dua poin penting, Pak Menteri, minyak goreng merah ini menjadi sangat penting dan juga masalah ekosistem digital ini, UMKM masuk di sana.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, kita ke kiri, Bu Elly Rachmat Yasin.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi Pak Teten, beserta Pimpinan Komisi VI dan jajaran,



Mungkin saya hanya sedikit menyampaikan, untuk memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, tentang bantuan BPUM, yang sampai saat ini masyarakat benar, pelaku UMKM itu sudah banyak yang mempertanyakan kabar tersebut. Yang sudah ramai diberitakan di media, jadi selain terimbas oleh Covid-19, masyarakat pelaku UMKM juga terkena imbas langsung kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi saya ikut merespon atau ikut apa, menyetujui apa yang disampaikan oleh teman-teman, supaya itu masuk dalam kesimpulan, dan tolong diperjuangkan juga oleh Kementerian Koperasi untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Dan selain itu juga mengenai sistem distribusi bantuan BLT untuk UMKM dan BPUM, agar UMKM itu tidak mendapat bantuan *double*, jadi jangan sampai ada salah satu UMKM yang mendapat bantuan *double*, dari BLT dapat, dan dari BPUM dapat, sementara ada UMKM lain yang tidak mendapat satu pun. Jadi sistem distribusi bantuan itu juga harus lebih di, di apa, diarahkanlah seperti apa.

Lalu mengenai izin syarat peng-*update*-an nomor induk atau NIB, apakah itu juga masih berlaku, *gitu*, untuk para ultra mikro seperti tadi ditanyakan oleh Pak Rudi ya, karena memang mereka itu, pelaku ultra mikro, kebanyakan juga belum bisa mengakses NIB. Yang sementara mereka untuk KTP *aja* kadang-kadang juga ada yang punya, ada yang tidak, ya mungkin itu untuk lebih, lebih dirapihkan saja.

Mungkin sekian saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Makasih.

Apa masih ada, dari Anggota? Boleh, silakan Pak Ananta.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Iya, Pak Martin, keliatannya ini Pak Menteri perlu perkuatan, sehingga saya menyampaikan juga kalau kurang kuat saya akan memberikan tambahan supaya Pak Menteri lebih kuat, kan gitu. Karena BPUM ini saya yakin Pak Menteri saja, Pak Sekjen, dan para Deputi, itu meyakini bahwa itu penting untuk para UMKM. Sehingga saya berharap, Pak Menteri, yang saya pikir sebetulnya hari ini meskipun tidak belum bisa memberikan jawaban secara resmi tentang kepastian, tapi mungkin dalam *closing statement* nanti, bisa menyampaikan itu, karena saya yakin Pak Menteri kan sudah kenal Pak Jokowi, tentunya sudah lama mendampingi dan sebagainya, kira-kira ini *kayak* apa. Karena kalau ini sudah semakin hari *mepet* dengan akhir tahun, ini kan memang repot, karena memang BPUM ini akan kita jaga kualitasnya, juga supaya tidak *double* datanya, kemudian asal-asalan, sehingga kalau kawan-kawan ini juga ingin membantu, menyampaikan kepada masyarakat nanti supaya, supaya tepat.



Jadi saya kira itu, Pak, karena kelihatannya semua mendukung, mendukung, mendukung, nah kira-kira kalau jangan sampai di ruangan ini ada satu yang tidak mendukung, nah kan ini kan repot. Sehingga saya menyampaikan agar Pak Menteri juga mencatat, yang hadir Komisi IX ini, sekian, ada sekian orang, semua mendukung. Jadi kalau dengan Pak Menteri, itu artinya 120%, kan gitu, tidak hanya 100% yang mendukung, tapi 120%.

Saya pikir itu, Pimpinan.
Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Oh Pak Idris Laena, silakan.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Saya topik yang berbeda ini, Pak, Pak Menteri, mungkin Pak Menteri *enggak* bosan ini. Tiap tahun ini Dekopin masih dapat pagu ini, Pak, tahun lalu 7 tril eh 7 triliun, 7 miliar, tahun ini 4 miliar disalurkan ini, Pak, ya, atau *gimana*? Karena setahu saya sampai sekarang, kita tidak, belum pernah ada Rapat Dengar Pendapat Dekopin, bahkan saya juga tidak tahu Dekopin yang mana sebetulnya yang diakomodir oleh pemerintah. Itu *aja* pertanyaannya, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah habis ya, *kayaknya* sudah semua bicara, ya?

Baik, sebelum saya kembalikan ke Pak Menteri, pertama saya ingin menegaskan juga komitmen dari pemerintah, artinya menagih komitmen pemerintah dan saya yakin juga sebenarnya *mindset* dari Bapak Presiden juga sama, bahwa subsidi BBM yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena itu menyubsidi *output* atau produk, seharusnya memang diberikan secara *segmented*, kalau memang kita ingin lebih tepat sasaran. Dan yang *segmented* ini menurut saya sebenarnya BPUM, salah satunya. Itu juga pada waktu rapat yang lalu, saya sebenarnya tidak terlalu setuju jika untuk mengkompensasi akibat dari penurunan subsidi BBM itu, lantas semuanya itu ditumpahruahkan menjadi bantuan sosial. Karena sebenarnya, masyarakat kita segmentasinya berbeda-beda. Seharusnya itu menurut saya ya, di antaranya ya BPUM, lalu kemudian dukungan untuk petani, dukungan untuk



nelayan, misalnya seperti itu, nah itu akan lebih tepat guna ketimbang berbentuk bansos, itu kalau opini saya. Dan saya pikir BPUM dengan jalan selama ini, kalau saya lihat di lapangan, sebenarnya relatif lebih baik daripada bentuk-bentuk yang lain, karena ini langsung ditransfer kepada penerima. Dan terus-terang, saya lihat juga, memang yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat juga tidak dapat, itu saya saksikan sendiri. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ya, komit untuk menopang daya beli masyarakat dan seluruh kementerian juga ingin melaksanakan secara konsisten arahan dari presiden, bagaimana mengatasi dampak perekonomian kita sekarang ini, yang sebenarnya *double impact*, yaitu dampak daripada krisis global dan kemudian dampak daripada kebijakan menurunkan subsidi BBM, maka harusnya BPUM ini bukan dihilangkan, justru ditambah. Nah ini jadi ini saya rasa di sini, ya saya sebagai fraksi pendukung pemerintah, saya meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga komitmen presiden. Dan kalau tidak menjaga komitmen presiden, ah berarti ada, ada yang salah ini, *something wrong*. Jadi Pak Menteri silakan, selamat berjuang kita memberikan dukungan penuh.

Yang kedua, saya juga melihat di berita tapi, Bapak belum memberitahukan kepada kami, sudah terjadi sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk solar ya, Pak, ya, solar untuk koperasi nelayan. Itu saya apresiasi dan saya rasa itu sangat baik, kami dari Komisi VI melihat bahwa mitra-mitra kerja yang ada di Komisi VI sudah saling memperkuat. Kami apresiasi itu, Pak. Dan mungkin nanti suatu saat kami atau mungkin secara tertulis juga bisa Bapak sampaikan kepada kami progresnya seperti apa, supaya kami juga bisa dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN juga memperkuat program ini. Ini kalau saya tidak salah, baru sekitar berapa lokasi, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Piloting-nya 7.

KETUA RAPAT:

Nah baru 7, boleh ini menjadi *pilot project*, mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan, lalu kita akan lihat juga bagaimana antara BUMN dan Koperasi bisa saling menopang, ya saling mendukung untuk kemajuan masyarakat kita.

Saya pikir itu Pak Menteri, masukan dari saya, saya kembalikan ke Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Baik.

Pak Ketua dan Para Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,



Yang pertama mengenai BPUM, saya kira saya setuju, bahwa ini kita harus berhasil, bagaimana program BPUM ini bisa dijalankan, karena dampaknya apa manfaatnya sangat penting bagi usaha mikro yang memang terdampak di masa pandemi dan sekarang juga pasca kenaikan BBM. Jadi ini memang termasuk tiga usulan kami kepada presiden, BPUM, termasuk kemarin kami susul dengan solar ya untuk nelayan, karena 60% biaya produksi nelayan itu bahan bakar, sehingga kami perlu *address* dan kami diperintahkan kemudian bersinergi dengan Pak Erick Thohir. Jadi ini nanti sekaligus saja, jadi ini ada 11 ribu desa nelayan yang, lalu SPBU-nya ada 388. Jadi selama ini para nelayan-nelayan kecil yang kami *address* yang dibawah 10 GT itu membeli solar di atas harga SPBU antara 6 sampai 10 ribu. Nah sehingga kami mengusulkan, kita membuat pertashop-pertashop mini di setiap desa berbasis koperasi dan kita membangun sistem digital di koperasinya *by name by address*, sehingga nanti tidak akan bocor. Ya ini dengan Pertamina, dengan BRI, kami *udah* turun, ya jadi *piloting*-nya 7 tapi Pak Presiden *udah* minta 250. Jadi nanti *Insyah Allah* ini kita hanya butuh waktu tiga bulan dari mulai sekarang. Jadi nanti mungkin kami akan *ngundang* juga ke dapil masing-masing ya, kita akan lakukan.

Enggak, ini *enggak* masalah, Ibu, *enggak* masalah pokoknya karena ini B2B antara Pertamina dengan koperasi. Nanti pembiayaannya dari BRI, karena ini kan kira-kira hanya 250 jutaanlah investasinya, nah tapi kami juga nanti akan benahi koperasinya, bisnisnya, jadi ini akan lancarlah. Ya akan lancar, kita, kemarin saya juga baru pulang dari Indramayu untuk memastikan, tapi ini yang di bawah 10 GT ya, di bawah 10 GT. Karena kalau yang juragan kita *enggak ngurusin*, *enggak* perlu, nah ini di tempat paling banyak *nih*, nanti ya. Ini bisa, bisa banyak. Pak Presiden mintanya 250 sekaligus tapi memang, ya banyak, ini bisa artinya apa, kuota solarnya ada, mekanisme pembiayaan juga ada, ya kami sudah punya model, modelnya. Kami kemarin sama Pak Erick coba *launching* sistemnya di Cilacap, jadi nanti *enggak* akan bocor, karena *by name by address*, kebutuhan per nelayan terdata, lalu para nelayannya bawa *barcode* sehingga nanti *stock* mereka, katakanlah mereka dapat 10 liter per hari kali sebulan, 260 lah, pekerja, 260 liter, jadi mereka akan aman dan tidak akan dijual di, di *market*.

Nah yang ketiga, kami juga sedang memikirkan kalau nanti ada kenaikan LPG, para pedagang kecil yang kaki lima begitu, yang menggunakan gas, goreng-gorenganlah, tukang gorengan, ini kita sedang antisipasi juga. *Insyah Allah* lah, kami langsung ke Pak Presiden.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Izin, Pak Ketua.

Pak Menteri,



Saya mau tanya, Pak, walaupun tidak sebesar nelayan, tapi kebutuhan terhadap BBM bersubsidi ini, ini dibutuhkan juga oleh petani, Pak, untuk menggerakkan traktor dan lain-lainnya, Pak, *rice milling* dan lain-lainnya. Nah ini bagaimana kita mensinergikan dan mengkombinasikan program ini, supaya bisa berlaku untuk nelayan dan juga bisa berlaku untuk petani, Pak?

Terima kasih.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Terima kasih Bu, masukannya.

Kemarin juga kami sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk petani, tapi setelah kita pelajari, ternyata konsumsi paling besar bukan di BBM, tapi di pupuk, dan nanti kalau gasnya naik, ini yang harus kita antisipasi. Ya, begitu.

Berikutnya yang minyak makan merah. Nah minyak makan merah ini memang bukan untuk meng-*address* soal harga minyak makan, minyak goreng, kemarin, kenaikan minyak goreng, tapi kita ingin memang ke depan, industri sawit ini tidak hanya dikuasai yang besar. Nah petani-petani sawit ini bisa membuat, memproduksi sawitnya sampai ke produk hilirnya, yaitu minyak makan merah. Nah FS-nya sudah dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan, dan minyak makan merah ini karena bijinya tinggi, pro vitamin A, vitamin E-nya tinggi, bahkan di Malaysia sudah dibikin dan di ekspor ke China dan dipakai untuk sumber vitamin A. Nah ini kami menggunakan anggaran dari BPDKS, karena ada jatah, ada dana petani BPDKS yang baru dipakai 8,9%. Nanti hibah, karena ini baru *piloting* di Sumatera Utara, tapi ada koperasi-koperasi yang juga secara *finance* bisa mandiri, itu bisa membuat pabrik ini. Jadi kalau usulan kami, setiap seribu hektar, petani sawit itu bisa *membikin* satu *mini plant* minyak makan merah dengan produksi 10 ton per hari. Dan untuk menjualnya ke mana? Sepuluh ton itu ya hanya untuk dua kecamatan, kalau Sumut *tuh* kemarin, Pak, Pak Ketua, dan ini minyak makan merah, memang warnanya merah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Warnanya merah kan?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Merah, tapi bukan warna politik ini, ini

KETUA RAPAT:

Nanti tinggal bikin warna biru, warna biru, warna kuning.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):



Minyak goreng *udah* kuning, Pak. Warnanya memang merah, karena ini tidak di *bleaching*, jadi prosesnya sederhana, sehingga warnanya merah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itu kan investasinya 23 miliar, katanya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, itu ROA-nya 4,3 tahun, jadi dari segi perbankan 6 tahun juga layak bisnis. Jadi ini *enggak* masalah, Pak, *enggak* jadi masalah, jadi,

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ada kajiannya *enggak*, Pak Menteri?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Ada dari,

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nanti dikasih ke Komisi VI.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Siap, siap, Pak, iya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Enggak, itu kan koperasi.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Pak Deddy juga kan di Kaltara, misalnya, boleh saja, karena ini kan bisa dibuka untuk siapa aja.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Harus, Pak, harus, kalau Kaltara, harus.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Pembiayaan nanti tinggal bantuin ke BPDKS-nya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):



Karena dulu juga janji Kementerian Perindustrian itu, Pak, waktu kita sedang langka minyak goreng, waktu itu kan ada program katanya mau bikin pabrik minyak goreng di daerah-daerah ya, harus, harus masuk, Pak, Kaltara, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Ya, jadi ini, ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, jadi tidak, tidak hanya jual sawit mentahnya, tapi bisa mengolah sampai

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Enggak, mohon maaf, Pak Menteri, itu kan ada dana pinjaman dari LPDB-nya *enggak* di sana?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

LPDB akan membantu manajemen bisnisnya, Pak, karena ini kan kita sedang mulai pelatihan untuk,

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Enggak, pinjamannya ke koperasi.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Bisa saja ada pinjaman, tapi kan memang tetap harus ada ...

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Dari 23 miliar itu.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Oh itu BDPKS.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

BDPKS?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, hari ini, kemarin DED-nya

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itu tanpa bunga ya, hibah ya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Hibah, jadi detail *engineering design*-nya sudah selesai, sudah diserahkan dari PPKS kepada kami dan kami sesuai arahan presiden, karena ini afirmatif, hanya SNI-nya juga hanya untuk koperasi petani, jadi tidak akan diberikan untuk usaha besar, usaha besar didorong tetap minyak goreng aja.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Iya itu harga jualnya 9.000?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Bisa lebih murah, karena ini pabriknya terintegrasi, jadi pabriknya dari kebun, jadi per seribu hektar, satu *mini plant*, dan *market*-nya juga di sekitar situ, sehingga ini bisa, dari segi biaya logistik

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Break event-nya berapa, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Kenapa?

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Harga BEP-nya berapa?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Harga BEP kemarin berapa, Pak? Pokoknya kami bisa, kami kan hitung bersama-sama bertiga, Pak, jadi PPKS, lalu BSN, sama BPOM.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Eenggak, jangan sampai ini, *eenggak*, jadinya proyek gagal.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Insya Allah kita kawal, Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jadi enggak *visible* kalau enggak *visible* proyek gagal, itu kan nama Pak Menteri juga kurang bagus.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Ya memang ada *black campaign* juga, ya, *black campaign*, tapi saya udah bicara dengan besar-besaran bahwa ini tidak mengganggu bisnis industri sawit.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ini koperasinya yang ditunjuk 10 ini, yang *pilot project* ini, koperasi ini kriterianya apa?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Yang punya kebun.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Yang punya kebun?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Harus punya kebun, ada yang punya 3 ribu

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Berarti ini sudah beroperasi cukup lama?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sudah, sudah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sudah punya *experience* lama?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Ya bukan baru, jadi memang petani misalnya di Agam itu ada 3 ribu hektar, ada antara 1--1000, sampai 3 ribu hektar, mereka punya, jadi mereka bisa *bikin* ini. Bahkan di, di Kalbar itu mereka akan menggunakan pembiayaan sendiri, ya jadi di Kalteng, di Kalsel juga akan pembiayaan sendiri. Mereka bukan, bukan koperasi miskinlah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ajak Komisi VI kawal juga, Pak Menteri

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Siap, siap.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ini soalnya cukup bahaya kalau gagal, nama baik Kementerian Koperasi dan UMKM, kan.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, Pak Menko juga waktu itu sudah mengingatkan, bahwa pernah *dibikin*, apa pabrik CPO yang punya petani, tapi memang gagal. Nah kami evaluasi, karena CPO-nya nanti harus dijual lagi ke industri, kalau ini kan bisa langsung dijual ke pasar.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pertanyaan saya, Pak, itu kan pabrik minyak gorengnya doang, kan? Berarti dari CPO ke minyak goreng?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sama CPO.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Oh sudah, berarti dari

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Dua CPO, 2, 3 itu dengan CPO.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Berarti petani jual TBS-nya langsung ke sana, itu akan jadi CPO dan langsung minyak goreng.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya diolah sendiri, iya diolah sendiri.

Jadi kalau CPO-nya 17, eh 15 miliar, untuk dari CPO ke minyak makannya itu 7 miliar.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pasarnya sama kan?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Pasarnya, sama.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sama dengan yang CP yang biasa kan, CPO.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Sama, bahkan kami sekarang sudah ada MoU dari jaringan *restaurant* 200 ton permintaannya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itu harus hati-hati dikaji, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya nanti FS-nya di *share* aja.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

FS-nya, karena ini karena ini meng, ini ikut masuk ke segmen pasar yang sama, masalahnya ini. Apakah diferensiasi yang dia tawarkan itu dianggap penting sama masyarakat, itu poin pentingnya di situ. Jadi karena sama, ini kan masuk sesuatu segmen yang memang pasar yang sama, maka Bapak perlu satu diferensiasi yang dianggap penting oleh masyarakat, tapi ada proses edukasi. Maka saya minta peta jalannya ke depan, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya kita akan *champaign* nanti dengan para *chef* yang sudah lihat minyak makannya, untuk bahwa ini sehatlah. Jadi digoreng, kalau ayam digoreng pakai minyak makan merah, ayamnya *enggak* jadi merah, Pak Darmadi, tempenya juga tetap kuning.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kalau merah, mau merah, banteng menang semua, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Tapi *Insha Allah* lah ini kita kawal, ini *udah study*-nya panjang, kami hanya memanfaatkan, ini di bawah BUMN kan pusatnya. Jadi kami berdua sebenarnya Pak Erick juga, minyak makan merah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ini kan dibuat minyak goreng merah untuk *ngalahin* yang kuning tadi.

KETUA RAPAT:

Jangan *dong*, hasilnya kuning maksudnya Pak Menteri tadi.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Dari dulu kan memang kuning kemerah-merahan, Pak Darmadi.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, iya.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Saya interupsi sedikit, boleh?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Saya kira itu ya, digitalisasi saya kira kita sudah lakukan, Pak, tapi sama ya.

KETUA RAPAT:

Sama.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Saya sedikit, ini kan begini, ini proyek yang tadi itu kan menarik sekali. Saya kemarin sempat terkejut juga, LPDB itu ada masalah sampai 146 miliar atau berapa itu?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya itu tahun 2012-2013, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):



Iya, iya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Bukan tahun, bukan masa kami.

F-PG (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Jadi ada korupsi di LPDB itu 146 miliar, kurang lebih, saya *enggak* tahu angkanya. Maksud saya kenapa *enggak* membiayai proyek-proyek seperti ini, LPDB? Itu kemarin itu yang dibiayai departemen apa, *supermarket*, ini apa, mall, kalau *enggak* salah.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sulawesi Selatan, ya?

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Iya. Maksud saya, Pak Menteri, *kenapa enggak* seperti ini, terus kita alokasikan anggaran, ini kan luar biasa, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya Pak Idris, sekarang kita diperintahkan presiden untuk membiayai koperasi-koperasi di sektor pangan, Pak, produksi.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Iya, iya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Jadi ini sawit, nanti hortukultura, kami biasanya ada *piloting*.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Saya mau tanya, Pak, LPDB kan dapat anggaran ini apa, Pak, ya? *Kok* setiap tahun dapat anggaran, bukan penyertaan modal?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya dari, dari, dari

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Ini penyertaan modal?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, kan ini BLU, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Iya.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Kan ini BLU, jadi Menteri Keuangan menyuntikkan pembiayaan.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Bukan dia tersendiri? Dari, dari langsung penyertaan modal negara, PMN? Kok di Kementerian Koperasi dikasihkan lagi, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Pak, bisa dijelaskan dana LPDB. Mungkin ada Dirut LPDB-nya, ada, Bapak.

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Izin.

Pak Ketua, Pak Martin, dan Bapak/Ibu sekalian,

Kalau LPDB itu memang sumber dananya yang untuk operasionalnya itu dari Kementerian Keuangan, Pak, langsung, Pak. Jadi LPDB itu BLU yang di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, Pak. Secara teknis, operasionalnya itu di Kementerian Koperasi.

Menyinggung tadi masalah yang tadi Bapak sampaikan, itu memang benar, Pak, itu di tahun 2012 dan 2013. *Alhamdulillah* tahun sekarang, Pak, LPDB *udah* mulai banyak transformasi untuk menjaga itu semua, bahkan ada Permenkopnya dari Pak Menteri, Pak Teten, kita diarahkan untuk semuanya *full* ke koperasi, Pak. Koperasi yang mana? Koperasi yang sehat, yang sekarang ditujukan untuk pangan, tadi termasuk sawit, minyak makan merah itu, Pak.

Kemudian untuk *ngikuti* sekarang yang untuk Program Solusi, Pak, solar untuk nelayan itu, Pak. Jadi LPDB, *alhamdulillah* sekarang NPL di LPDB 0,18%, Pak, sekarang, jadi *full* kepada koperasi, Pak, sekarang.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Jadi *gini*, izin, Pak, Pak Ketua.



Saya ikut membidangi LPDB, Pak, jadi Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir ini, maksud saya *kenapa kok* dari Kementerian Koperasi kita dulu *enggak* pernah dialokasikan anggaran dari Kementerian? Semuanya hanya dari PMN, jadi modalnya, ya kan?

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Izin, Pak.

Untuk anggaran LPDB itu PNBPN, Pak, jadi kami tidak *ngambil* dari anggaran rupiah murni yang dari Kementerian Koperasi, Pak. Jadi PNBPN kita sendiri, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Oh yang ini, Pak?

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Iya, PNBPN, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Oke iya, tapi apa namanya, dana yang dikelola itu kan masih tetap seperti yang hasil perolehan dari PMN itu, ya penyertaan modal negara?

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Penyertaan Modal Pemerintah Non Permanen, Pak, istilahnya, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Iya, tahu.

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Iya non permanen, iya Pak, ada, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Maksud saya itu tadi.

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Oh itu.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Tahun ini kami mengusulkan 3, tambahan 3 triliun sebenarnya, Pak.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Oh *gitu*, Pak, ya?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, untuk LPDB.

F-P.GOLKAR (Ir. H. M. IDRIS LAENA, M.H.):

Nah ini, ini menarik sekali, Pak, kalau kita bisa menghasilkan minyak goreng warna kuning tadi dari, dari merah menjadi kuning, maksud Pak Menteri.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Pimpinan, Pak Pimpinan.

Saya LPDB tadi, NPL 0,18, bukan sangat kecil sekali, bahkan bank *aja* 3% lebih kan. Ini menjadi tanda tanya buat kami sebetulnya, ini data *beneran* atau palsu, itu yang pertama, Pak.

Yang kedua, jangan-jangan ini karena *saking* kecil ini karena terlalu hati-hati, jadi *enggak nyalurkan* apa-apa, atau dipilih benar-benar sehingga terlalu selektif, karena akibat paranoid zaman dulu, Pak. Jadi makanya banyak dari konsumen yang ada konstituen kami di Jakarta saja, itu kesusahan *loh*, Pak, dana bergulir ini, ya. Jadi ini 0,18 butuh penjelasan, ini kenapa bisa sampai sebegitu rendah, begitu, Pak, itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, yang ini terakhir, soal ini nanti kita rapatkan tersendiri *aja*, LPDB ini. Ya boleh ini dijawab, *kenapa* 0,18, terakhir ini.

DIRUT LPDB (SUPOMO):

Izin, Pak Menteri, Pimpinan.

Jadi untuk 0,18 itu kita memang ada aturan PMK-nya, Pak, dari Kementerian Keuangan dan kami setiap bulan dikonfirmasi oleh PPK BLU, Pak, jadi yang membidangi Direktorat yang ada di Kementerian Keuangan, Pak, itu. Jadi setiap bulan kita melakukan diverifikasi atas apa namanya, NPL kita. Masalah penyaluran, *alhamdulillah* kita dari tahun 2020 sampai



sekarang, *alhamdulillah* memenuhi target yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Darmadi.

Jadi untuk koperasi-koperasi yang masih belum memenuhi syarat, kami masukkan dulu ke inkubator bisnis di LPDB, Pak. Jadi kita bina dulu, kita *rapihin* dulu, karena ini kan apa harus, harus tepat sasaran dan juga harus

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Iya saya minta itu apa, kalau boleh minta datanya, Pak, Bapak salurkan ke mana aja.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Boleh, boleh, kan ini kan dari

KETUA RAPAT:

Enggak, kita memang mau *agendain* ama LPDB ini.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Karena ini sebetulnya *gini*, Pak, koperasi ini walaupun ini kan kelemahannya adalah manajemennya, Pak, ya kan. Saya enggak tahu sekarang, apakah Bapak bina dulu sampai luar biasa, sehingga baru Bapak kasih baru, ya. Karena kan kalau *dibandingin* dengan *modern management* yang ada kan, sementara BCA *aja* masih di atas ini *loh*, Pak. Itu BCA betapa sulitnya, Pak, kalau kasih kredit, Pak. Bank tersulit yang paling *prudent* itu BCA, Pak, sampai saat ini, itu *aja* masih di atas Bapak, Bapak nol koma *loh*, Pak. Ini kita sebenarnya agak curiga juga, Pak, *gitu* ya. Jadi nanti coba Bapak kasih nanti, ada khusus ya spesial, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, memang kita mau rapat sama LPDB, makannya simpan dulu, Prof.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Iya, siap, siap.

KETUA RAPAT:

Ini 3.30 saya perpanjang dulu, 15 menit ya, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Tadi saya mau sampaikan persyaratan BPUM *udah* diperlonggar, jadi hanya tadi, memiliki KTP elektronik saja, lalu mempunyai usaha mikro, bukan PNS, bukan Anggota TNI, bukan Anggota Polri, bukan pegawai BUMN/BUMD, itu *aja* cukup ya, jadi WNI, Pak, itu *udah dimudahinlah*, nanti pengusul juga banyak.

Lalu mengenai Dekopin, Pak, tolong dijawab.

DEPUTI BIDANG BERKOPERASIAN (AHMAD ZABADI, S.H., M.M.):

Baik, terima kasih, Bapak Menteri, mohon izin.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Terkait dengan Dekopin, sampai saat ini anggaran Dekopin masih diblokir, kecuali untuk anggaran gaji karyawan, karena pada umumnya karyawan Dekopin ini memang sudah bekerja cukup lama di Dekopin dan saat ini berdasarkan usulan dari kedua belah pihak, ini mengusulkan dari masing-masing unsur karyawannya untuk dibiayai dan besarnya per tahun kira-kira sekitar 1,7 miliar. Selebihnya yang lain masih kita blokir, karena memang sampai saat ini untuk keduanya masih dalam posisi yang belum dapat **disahkan**, begitu.

Saya kira *gitu*, tambahan penjelasan kami.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya, berikutnya mungkin yang dari Pak Hendrik tadi. Kita sudah mendorong percepatan belanja 40% APBN dan APBD untuk produk UMKM. Saya kira hari ini *udah* mencapai berapa, saya lupa, dan berapa? Sudah 39%, Bapak. Jadi kami melakukan bisnis *matching*, mempermudah dengan LKPP, mempermudah prosedur di LKPP mengenai e-katalog, jadi sekarang sudah ada 1 juta produk UMKM yang *on boarding*. Jadi percepatannya kita lakukan. Nah kita juga dalam bersamaan ingin mendorong UMKM kita *go-digital*, target kita 30 juta terhubung dengan *e-commerce*, tapi sekarang bukan hanya *e-commerce*, sekarang ini muncul *social commerce*, juga *games commerce*, dan sebentar lagi ada *tv commerce*. Jadi ini akan makin banyak *marketplace* digital yang akan dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Memang yang harus dipikirkan bukan hanya sekedar terhubung, tapi bagaimana bisa mereka bertahan, ya. Nah ini yang perlu pendampingan, ya,



terus-menerus, agar UMKM kita bisa memanfaatkan *market digital* kita yang besar untuk usaha mereka berkembang. Per hari ini kita bisa mengatakan, mereka yang terhubung ke *market digital* di tengah pandemi juga bisa, paling bisa bertahan. Jadi ini kita akan terus lakukan, target kita ini memang yang mikro, karena tinggal 11, per hari ini udah 11, 19,5 juta jadi kita tinggal 11 jutaan lagi dan kita sasar dari *secondary city*, ya bersama dengan teman-teman *e-commerce*.

Lalu mengenai data tunggal, ya, ini karena memang menjadi kebijakan nasional, ditargetkan memang 14,5 juta, pada September ini sudah 10 juta data atau sekitar 68,9%. Upaya untuk percepatan kami sudah lakukan, mulai dari penyederhanaan juklak, pembentukan tim percepatan, *monitoring* dan pengendalian harian, pemberian pendampingan kepada tim daerah, termasuk koordinasi dan kerja sama dengan BPS. Tadi Pak Hendrik, yang 30% ruang usaha juga sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan. Ya jadi yang memang jadi masalah masih di harga, Pak, misalnya di bandara itu masih harganya masih mahal, jadi ini kita optimumkan. Barangkali itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak, Pak Menteri.

Itu yang

KETUA RAPAT:

Apa? Nanti dulu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sebentar, Pimpinan izin, izin, izin.

KETUA RAPAT:

Iya, boleh.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Palang pintunya dijaga di sana.

KETUA RAPAT:



Bukan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Harus bayar tol dulu.

KETUA RAPAT:

Tadi kan udah kita ketok, terus, terus, ayo, Prof.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Enggak, Pak Menteri, ini kan masukannya 30 juta ini mudah, ya kan. Bapak sekarang udah 19 juta. Ini UMKM ini peran koperasi untuk menciptakan proses penciptaan nilai itu, caranya bagaimana? Karena orang masuk ke dalam kan ya hanya masuk *aja*, tapi *enggak* ada menciptakan nilai gitu. Nah peran Kementerian Koperasi itu bagaimana caranya ini, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Bahkan bukan hanya sekedar nilai, kita sekarang sedang mengusulkan perubahan-perubahan kebijakan, karena kita tidak ingin seperti di India, terutama untuk melindungi UMKM, konsumen juga. Jadi ini sedang dalam proses dengan Menkominfo, dengan Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Sekretariat Negara, karena ini harus ada payung hukum termasuk perlindungan pribadi, ini jauh lebih besar daripada itu. Nah sebenarnya *value creation*-nya untuk di *e-commerce* ini, ini kan kita juga ada riset dengan Indosat, dengan apa lagi, ya satu badan, karena semakin banyak UMKM yang *go online*, juga persaingan di dalam *marketplace* juga makin tinggi. Jadi ada

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sudah *crowded*, Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Iya turun, ya memang turun, turun pendapatannya. Nah karena itu yang diperlukan sekarang sebenarnya bagaimana kita mendorong para UMKM itu yang *go online* juga memiliki produk yang kompetitif jadi bukan produk yang itu-itu *aja*. Dan ini tidak mudah juga ya karena ada kaitan dengan *supply* bahan baku dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang yang terhubung ke *online* jauh lebih menguntungkan dibanding yang *offline*. Seperti target kita sekarang pedagang pasar, ya, pedagang pasar itu sekarang juga bisa jualan secara *online*, dan sudah banyak aplikasi digital untuk pedagang pasar. Jadi di satu pedagang pasar sekarang *udah* bisa punya pendapatan 3 juta per hari karena terhubung ke *online*, jadi tukang sayur, tukang-tukang



sayur itu sekarang sudah, sudah bisa *online*, jadi ini bisa menggeser *supermarket* modern sebenarnya untuk sayur, jadi ada banyak, Pak Darmadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Yang saya khawatir, Pimpinan, mereka itu *enggak* bisa *create value* jadi sekedar masuk *aja*, kan banyak juga yang gugur Pak Menteri, dari hasil pengalaman itu banyak yang gugur. Karena *main value* itu kan *value creation*-nya itu kan nanti main di porsi *benefit*-nya Pak, yang poin di atasnya yang dimainkan sehingga itu nanti *value*-nya bisa naik, kan? Bukan hanya *product value* kan, mungkin *service value*, *personal value*-nya, *image value*-nya. Nah ini yang peran Kementerian Koperasi ini, konsepnya apa, ini yang penting sebetulnya Pak Menteri, supaya ini berapa *sih* contoh yang berhasil itu Yang gugur di tengah jalan juga banyak sekali kan. Kita kan sering pelatihan, Pak Menteri, kita tanyain *tuh* satu-satu, "Eh kamu dulu sudah mulai, sekarang *gimana*, sekarang *gimana*". Nah peran Kementerian Koperasi dan UMKM itu kita harapkan betul, begitu, Pak Menteri.

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Yang *g-online* itu kita urus juga kan sertifikasinya, semuanya, Pak, izin edarnya, kan *enggak* bisa izin, *enggak* bisa dijual di *online* kan, kalau, iya seperti itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, disimpanlah buat rapat berikutnya, ini kan sebenarnya fokus untuk RKA K/L dan BPUM.

Oke, *makasih* atas jawabannya, Pak Menteri.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kalau *enggak* bertanya, disuruh tanya, kita tanya, suruh berhenti.

KETUA RAPAT:

Bukan, ini *udah* 5 menit lagi waktunya.

Ayo sekarang kita masuk ke kesimpulan, nanti kita rapat lagi sama Pak Menteri yang untuk isu-isu terkini. Termasuk juga langkah apa *tuh* kemarin,



pengawasan terhadap itu ya Pak Menteri ya, koperasi yang bermasalah *tuh*, kita belum rapat lagi soal itu. *Udah ya? Oke.*

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI tentang Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, Proses Pelaksanaan BPUM Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pelaksanaan BPUM Tahun Anggaran 2023, Kamis 22 September 2022:

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2023 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 sebesar Rp1.407.500.000.000,00. Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

Setuju ya? Ini *enggak* harus eksak ya? Nanti Pak Menteri ini *nombok* 17 juta 242, sudah? Surat Badan Anggarannya *enggak* itu ya? Turun *dong* namanya itu. Kalau *enggak*, jangan *dibikin* begitu. Surat Badan Anggarannya seperti apa? Coba lihat, mana *nih*? Ini dia ini, iya, *dibikin kayak gini*, jangan *dipanjangin*, karena itu artinya turun 17 juta. Jadi sesuai surat itu, karena itu pembulatan kan di Badan Anggaran? 1.407,5 miliar, *kayak gitu*. Kalau *dipanjangin* nanti Pak Menteri *nombok* 17.242.000. Miliar, ada miliarnya itu, 1407,5 miliar. *Loh* bukan, kamu ini. Itu di angka itu 1407,5 miliar, tulis dulu miliarnya, eh bukan, ditulis *aja* miliar, *enggak* usah pakai dalam kurung, sesuai surat Badan Anggaran, nah ya *enggak* usah rupiah lagi, itu kan *udah* ada Rp, miliar, nah, *udah* itu *aja*, *enggak* usah *dipanjangin*, ya Pak Menteri kan? Nanti kalau *enggak*, Bapak *nombok* 17 juta.

... Ya, Pak, setuju ya?

(KETOK PALU 1 KALI)

Apa? Iya, 1004, 1.000 miliar kan pakai triliun, M-nya *gede*. Inilah kalian ini, 1.000 miliar itu 1 triliun. Ya *udah* diketok tadi, *enggak* ada perubahan.

2. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi dan UKM RI atas pengusulan alokasi anggaran program BPUM Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2022 sebesar Rp1.200.000.000.000,00.

Bagaimana, Pak Menteri, ya? Pak Sesmen, komentar? Kalimatnya, yang lebih pas. Bukan ini lain, soalnya ini tahun 2022, kan?

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

“Atas pencairan anggaran program BPUM Kementerian Koperasi UKM tahun 2022 sebesar....”



SESMEN KEMENKOP UKM (ARIF RAHMAN HAKIM):

Atas pengalokasiannya *aja*, kalau pencairan, belum teralokasi *tuh*.

KETUA RAPAT:

Atas, ya *udah* benar berarti, "... atas pengusulan alokasi", kan, Pak?
Udah betul berarti.

Oke ya, kita ketok ya?

(KETOK PALU 1 KALI)

Nah itu di *bikin* titik di situ titik, titik terakhir, tandanya *udah* selesai.

3. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju ya?

(KETOK PALU 1 KALI)

Baik, apakah sebelum menutup, apakah ada *closing statement* dari Pak Menteri?

MENTERI KOPERASI DAN UKM RI (TETEN MASDUKI):

Cukup, Pak Ketua.

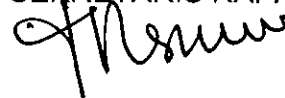
KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Jika demikian, izinkan saya menutup rapat pada hari ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**(KETOK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.46 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT,
SEKRETARIS RAPAT



DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

